



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 2471–2480

Peran Kepemimpinan Visioner dalam Mendorong Reformasi Kebijakan di Sektor Publik

Reza Triyana, Eli Apud Saepudin, Ana Suktiana, Aninda Nurfaridah, Rani
Anggreini Dewi

Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2830>

How to Cite this Article

APA : Anggreini Dewi, R., Saepudin, E. A. ., Nurfaridah, A., Suktiana, A. ., & Triyana, R. (2025). Peran Kepemimpinan Visioner dalam Mendorong Reformasi Kebijakan di Sektor Publik. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2471 – 2480. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2830>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Peran Kepemimpinan Visioner dalam Mendorong Reformasi Kebijakan di Sektor Publik

¹Reza Triyana; ²Eli Apud Saepudin; ³Ana Suktiana; ⁴Aninda Nurfaridah; ⁵Rani Anggreini Dewi

^{1,2,3,4,5}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Banten, Indonesia

Email: rezahandsome298@gmail.com

Diterima: 11—01-2025

| Disetujui: 12-01-2025

| Diterbitkan: 13-01-2025

ABSTRACT

Particularly given the need for rapid change and the increasing complexity of difficulties, the role of visionary leadership is becoming increasingly significant in the context of public sector policy reform. The ability of a leader to develop, communicate and execute a creative, long-term vision that serves as a roadmap for determining the policy direction and tactics of a public organization is known as visionary leadership. Visionary leaders in the public sector have an important role in managing change and overcoming opposition that may arise from bureaucracy, inflexible systems and scarce resources. In addition to creating flexible long-term goals, visionary leadership enables them to create policies that are relevant, adaptable and sensitive to the demands of society. To ensure that the resulting policies are legitimized and generally accepted, visionary leaders take an inclusive and cooperative stance, encouraging active involvement from various stakeholders, including the community. This strategy not only makes it easier to pass the policy, but also makes the community feel more invested in the proposed policy. In addition, an adaptable organizational culture that prioritizes education, staff empowerment, and innovation in public service delivery is fostered by visionary leadership. A sustainable process of policy transformation in the public sector is fueled by visionary leadership that promotes effective, efficient, and results-oriented governance. Reforms led by visionary leadership can create a public sector that is more adaptable, accountable, and attentive to the demands of society, thereby increasing public trust in government and improving public service quality standards.

Keywords: Visionary Leadership, Public, Policy Reform

ABSTRAK

Khususnya mengingat kebutuhan akan perubahan yang cepat dan meningkatnya kompleksitas kesulitan, peran kepemimpinan visioner menjadi semakin signifikan dalam konteks reformasi kebijakan sektor publik. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengembangkan, menyampaikan, dan melaksanakan visi jangka panjang yang kreatif dan berfungsi sebagai peta jalan untuk menentukan arah kebijakan dan taktik organisasi publik dikenal sebagai kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner di sektor publik memiliki peran penting dalam mengelola perubahan dan mengatasi pertentangan yang mungkin muncul dari birokrasi, sistem yang tidak fleksibel, dan sumber daya yang langka. Selain menciptakan tujuan jangka panjang yang fleksibel, kepemimpinan visioner memungkinkan mereka untuk membuat kebijakan yang relevan, mudah beradaptasi, dan peka terhadap tuntutan masyarakat. Untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima secara sah dan diterima secara umum, para pemimpin yang visioner mengambil sikap inklusif dan kooperatif, mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Strategi ini tidak hanya mempermudah pengesahan kebijakan, tetapi juga membuat masyarakat merasa lebih berinvestasi dalam kebijakan yang diusulkan. Selain itu, budaya organisasi yang mudah beradaptasi yang memprioritaskan pendidikan, pemberdayaan staf, dan inovasi dalam pelayanan publik dipupuk oleh kepemimpinan yang visioner. Proses transformasi kebijakan yang berkelanjutan di sektor publik dipicu oleh kepemimpinan visioner yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Reformasi yang dipimpin oleh kepemimpinan visioner dapat menciptakan sektor publik yang lebih mudah beradaptasi, akuntabel, dan memperhatikan tuntutan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan standar kualitas pelayanan publik.

Katakunci : Kepemimpinan Visioner, Publik, Reformasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan digitalisasi yang ditandai dengan perubahan yang cepat dan meningkatnya sensitivitas, sektor publik memiliki tantangan yang lebih kompleks dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi mendorong organisasi publik untuk lebih responsif, inovatif, dan mudah beradaptasi dengan perubahan keadaan. Mengingat situasi ini, kepemimpinan visioner memainkan peran yang semakin besar dalam mendorong perubahan kebijakan yang relevan dan sukses. Para pemimpin visioner mampu menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi untuk bekerja mencapai tujuan bersama sambil membangun visi jangka panjang yang fleksibel.

Selain berkonsentrasi pada pencapaian hasil langsung, kepemimpinan visioner mengadopsi perspektif jangka panjang yang kreatif untuk membangun sektor publik yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemimpin visioner di sektor publik dapat mengatasi hambatan internal seperti budaya birokrasi yang konservatif dan penolakan terhadap perubahan dengan memiliki visi yang jelas dan kapasitas untuk melihat kemungkinan di balik hambatan. Kepemimpinan visioner dapat mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dengan mengambil sikap inklusif dan kooperatif.

Dalam hal reformasi kebijakan, kepemimpinan visioner membantu organisasi publik mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih relevan secara sosial, mempercepat proses adaptasi perubahan, dan meningkatkan legitimasi kebijakan di mata publik. Oleh karena itu, memandu perubahan sektor publik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, layanan yang lebih berkualitas, dan standar hidup yang lebih baik membutuhkan kepemimpinan yang visioner.

METODE PENELITIAN

Publikasi ilmiah ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti jurnal, tesis, studi pustaka, media cetak, dan media elektronik yang relevan, pendekatan ini berupaya memberikan gambaran rinci tentang fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan evaluasi data naratif dan deskriptif daripada menggunakan metrik numerik atau statistik. Dengan menginterpretasikan data secara hati-hati dan memeriksa pola atau tema yang muncul, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mencoba memahami fenomena. Metode ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dan utuh kepada para peneliti dengan memungkinkan mereka untuk melihat konteks, proses, atau hubungan antara berbagai aspek fenomena. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat membantu untuk penelitian sosial, budaya, atau humaniora yang membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang keadaan dan kondisi subjek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di sektor publik, kepemimpinan visioner sangat penting untuk memandu transformasi kebijakan, terutama ketika perubahan yang signifikan diperlukan. Selain memiliki perspektif jangka panjang, pemimpin visioner juga mampu menggalang dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin visioner sering kali menanamkan rasa urgensi mengenai perlunya reformasi kebijakan. Sebagai contoh, para pemimpin publik yang membayangkan pemerintahan yang

lebih terbuka dan efisien mampu menggalang birokrasi dan mendapatkan dukungan politik yang diperlukan untuk reformasi administrasi Swedia. Mereka mengatasi hambatan kelangkaan sumber daya dan pertentangan birokrasi, yang sering terjadi di sektor publik, dengan menggunakan perspektif ini. (Moynihan & Wart, 2013)

Komponen kunci dalam menetapkan tujuan dan arah reformasi kebijakan yang relevan dan tidak ambigu adalah kepemimpinan yang visioner. Penelitian mengenai visi para pemimpin daerah di Indonesia menunjukkan adanya korelasi substansial antara visi pemimpin dan kecenderungan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan kinerja sektor publik. Selain memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan kebijakan yang lebih formal, visi pemimpin sangat penting dalam menginspirasi pegawai pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang visioner dapat mendorong proyek-proyek pembangunan yang lebih inklusif di sektor pembangunan daerah, terutama di daerah tertinggal, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Muttaqijn, 2015)

Selain menciptakan visi, para pemimpin visioner di sektor publik Indonesia bekerja untuk memenangkan hati para pemangku kepentingan yang berbeda. Yuwono dan Nugroho (2019) menyatakan bahwa keberhasilan reformasi kebijakan publik bergantung pada dukungan dari sektor swasta, karyawan, dan masyarakat. Agar reformasi kebijakan lingkungan di Indonesia dapat diterima dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, para pemimpin yang memiliki visi "kota hijau" telah berhasil menggalang dukungan luas dari komunitas perusahaan dan masyarakat melalui berbagai upaya edukasi. (Nugroho & Adiyanto, 2023)

Kemampuan beradaptasi sangat penting bagi kepemimpinan visioner di sektor publik Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan perkembangan tak terduga yang muncul selama proses reformasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap politik dan ekonomi dapat membuat gerakan reformasi terus berjalan. Pemimpin yang visioner mempercepat adaptasi lembaga-lembaga publik dalam menanggapi perkembangan eksternal, termasuk tuntutan akan keterbukaan, kecepatan layanan, dan peningkatan kualitas. Sektor publik dengan cepat menjadi lebih responsif dan efisien karena kemampuan para pemimpin yang visioner untuk menciptakan kebijakan yang selaras dengan kemajuan teknis, seperti digitalisasi layanan publik. Birokrasi yang lebih kontemporer yang dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan publik dihasilkan sebagai hasil dari pengaruh ini. Sebagai contoh, pemimpin yang inovatif yang dapat memodifikasi strategi mereka dalam menghadapi keterbatasan anggaran dapat menjamin keberlanjutan inisiatif yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. (Widiyastomo, 2020)

menerapkan kepemimpinan visioner bisa jadi sulit, terutama dalam birokrasi yang terkadang masih terjebak dalam pola kerja lama yang kaku. Pemimpin visioner harus memiliki rencana yang solid untuk menghadapi resistensi internal terhadap perubahan karena budaya birokrasi yang kaku dan terorganisir dapat menghambat inovasi. Keterbatasan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia merupakan tantangan lain yang harus diatasi oleh para pemimpin visioner agar dapat menjalankan program reformasi dengan sukses. Meskipun kepemimpinan visioner sangat penting, para pemimpin menghadapi beberapa kendala ketika mencoba untuk memajukan transformasi kebijakan. Resistensi birokrasi internal merupakan salah satu hambatan utama. Banyak pekerja di sektor publik menolak perubahan yang dapat mengganggu rutinitas harian mereka karena mereka terbiasa dengan status quo. Menurut penelitian Fernandez dan Rainey (2006), resistensi terhadap perubahan sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan masa depan, kegagalan untuk memahami visi, atau ketidakmampuan untuk mengenali

keuntungan jangka panjang dari reformasi. Para pemimpin visioner yang berhasil mengatasi perlawanan ini dengan melibatkan staf dalam proses perubahan, pendidikan, dan komunikasi yang efektif akan berhasil. (Fernandez et al., 2017)

Selain itu, dinamika politik dan tekanan eksternal dapat memperlambat reformasi kebijakan. Di beberapa negara, seperti Brasil, reformasi kebijakan sering kali tertunda karena perubahan kepemimpinan politik. Kepemimpinan visioner di sektor publik harus bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan politik serta memastikan bahwa visi jangka panjang tetap terjaga meskipun terjadi perubahan administrasi. (Boyne, 2003)

Di sektor publik Indonesia, resistensi sering kali menjadi penghalang yang signifikan untuk mengadopsi perbaikan kebijakan. Dengan menggunakan strategi inklusif dan komunikasi yang baik, para pemimpin yang visioner dapat membantu mengatasi resistensi ini. Penelitian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan lokal lebih berhasil dilaksanakan oleh pemimpin yang dapat mengatasi penolakan melalui komunikasi dan metode partisipatif. Dengan berbagi visi tentang layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih mudah diakses, para pemimpin di beberapa daerah dapat mengatasi resistensi staf dan masyarakat terhadap reformasi kebijakan layanan kesehatan. (Perubahan, 2019)

Telah dibuktikan bahwa kepemimpinan visioner meningkatkan efektivitas dan kemampuan beradaptasi organisasi publik dalam menghadapi perubahan situasi dalam pelaksanaan reformasi kebijakan di sektor publik. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner dapat mempercepat penyesuaian organisasi terhadap perubahan eksternal, termasuk tuntutan transparansi, persyaratan pelayanan publik yang lebih luas, dan kemajuan teknologi yang mengubah cara kerja birokrasi. Pemimpin visioner yang memiliki visi yang jelas dapat mendorong staf mereka untuk lebih mudah menerima perubahan dan inovasi, menciptakan budaya organisasi yang fleksibel dan fokus pada kemajuan yang berkelanjutan. Di sektor publik, keberhasilan reformasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang visioner. Menurut penelitian, perusahaan yang memiliki CEO yang visioner cenderung lebih kreatif dan fleksibel (Fernandez & Rainey, 2006). Pemimpin visioner dapat memandu organisasi melewati masa-masa yang tidak pasti dan membangun sistem yang lebih efektif untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum. Pemimpin yang berhasil menyampaikan visi jangka panjang sering kali mendapatkan rasa hormat dan kesetiaan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, komunitas lokal, dan organisasi internasional. Hal ini menjamin bahwa modifikasi yang disarankan dapat diimplementasikan dengan sukses dan mempercepat proses reformasi kebijakan. (Fernandez et al., 2017)

Terlepas dari tantangan-tantangan yang ada, kepemimpinan visioner memiliki pengaruh positif yang besar terhadap reformasi kebijakan sektor publik. Kepemimpinan visioner sangat penting dalam mendorong transformasi sektor publik yang lebih sukses dan efisien dengan menekankan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan layanan yang berorientasi pada masyarakat. Selain itu, fungsi ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang sangat penting bagi pertumbuhan tata kelola pemerintahan yang baik. Komponen kunci dari sektor publik adalah transparansi, terutama dalam hal reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan memberlakukan undang-undang yang menempatkan prioritas tinggi pada akuntabilitas, para pemimpin yang visioner berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan budaya transparan. Menurut studi tersebut, para pemimpin visioner yang memprioritaskan keterbukaan berhasil menerapkan mekanisme pengawasan yang membuat informasi tersedia bagi publik. Para pemimpin visioner di kota-kota besar seperti Surabaya dan Bandung menggunakan platform digital untuk memastikan bahwa informasi

mengenai program pemerintah, pengelolaan anggaran, serta pembelian barang dan jasa dapat diakses oleh publik. Dengan memungkinkan adanya pengawasan dan masukan dari masyarakat, platform-platform ini meningkatkan partisipasi publik. (Liyanti et al., 2024)

Mengingat parahnya degradasi lingkungan, kebijakan lingkungan hidup menjadi semakin penting di Indonesia. Mempromosikan visi pembangunan berkelanjutan sebagian besar merupakan tanggung jawab para pemimpin sektor publik yang visioner. Menurut beberapa penelitian, para visioner kebijakan lingkungan telah berhasil membawa perubahan dalam penghijauan kota dan pengelolaan sampah. Sebagai contoh, pengurangan sampah dan peraturan pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari tujuan "Kota Hijau" di Surabaya. Pemerintah daerah mendesak masyarakat untuk mendukung inisiatif "Bank Sampah", yang berhasil mengurangi sampah secara signifikan melalui partisipasi masyarakat. Selain meningkatkan kualitas lingkungan, strategi ini juga menghasilkan pendapatan bagi kota-kota yang berpartisipasi dalam program daur ulang. (Tuntutan, 1997)

Salah satu hasil konkret dari penerapan kepemimpinan visioner adalah meningkatnya partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan meningkat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan publik dan lebih diterima di masyarakat. Pemimpin visioner mampu memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak melalui pendekatan inklusif, yang membantu menurunkan resistensi terhadap kebijakan baru. Dengan demikian, legitimasi kebijakan juga meningkat, dan proses implementasi reformasi menjadi lebih lancar. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemimpin visioner di sektor publik sering kali mendorong partisipasi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif. Adapun penelitian yang menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki visi kolaboratif berhasil mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Di beberapa daerah, pemimpin menggunakan forum diskusi dan musyawarah bersama dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan yang akurat mengenai permasalahan yang mereka hadapi, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. (Makalao & Z Soeratin, 2023)

Kepemimpinan visioner sering kali mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi di sektor publik. Pemimpin visioner mampu memfasilitasi transformasi digital, seperti penerapan sistem manajemen elektronik dan layanan digital, yang tidak hanya mempercepat proses kerja tetapi juga mengurangi biaya operasional. Hal ini memungkinkan organisasi publik untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terukur. Kepemimpinan visioner juga terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia bagian Timur, di mana tantangan geografis seringkali menghambat akses terhadap pelayanan. Adapun studi yang menyebutkan bahwa pemimpin daerah yang memiliki visi pelayanan publik tanpa hambatan geografis berhasil memperkenalkan program layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan pelayanan dari jarak jauh. Implementasi ini telah meningkatkan kepuasan masyarakat dan menurunkan biaya operasional pemerintah daerah. Contohnya, layanan administrasi online di Papua memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengurus dokumen penting tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. (Oktaviana & Hendriani, 2017)

Di era digital, inovasi teknologi dalam pelayanan publik sangatlah penting. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, para pemimpin visioner di Indonesia memulai reformasi digitalisasi di sektor pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin yang mendukung adopsi e-government

telah berhasil meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan publik. Tujuan untuk menjadi "Kota Cerdas" di DKI Jakarta sedang dicapai dengan memperkenalkan platform digital yang memungkinkan pengaduan masyarakat secara online, pembayaran pajak, dan layanan kependudukan. Melalui struktur yang terintegrasi dan transparan, pendekatan ini mengurangi kemungkinan korupsi sekaligus meningkatkan efisiensi. Sangatlah penting untuk mengembangkan sistem teknologi dan komunikasi yang efisien bagi staf dan masyarakat umum. Para pemimpin yang visioner harus memastikan bahwa rincian mengenai visi, kebijakan, dan proses reformasi dikomunikasikan secara terbuka dan sering. (Andhika, 2018)

Pemimpin visioner harus memiliki keterampilan dalam mengelola sumber daya secara efisien, termasuk dalam mencari dukungan dari sektor swasta dan lembaga nonpemerintah. Kolaborasi dengan berbagai pihak dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan efektivitas program reformasi. Pendidikan merupakan sektor yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan SDM dan ekonomi. Pemimpin visioner di sektor pendidikan berperan dalam memastikan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman. Adapun penelitian yang menunjukkan bahwa pemimpin dengan visi pendidikan berkualitas tinggi mendorong reformasi kurikulum dan peningkatan fasilitas pendidikan. Di Kabupaten Sleman, pemimpin daerah yang memiliki visi pendidikan berbasis keterampilan praktis berhasil menciptakan program yang mempersiapkan siswa untuk dunia kerja. Kebijakan ini diimplementasikan dengan menyediakan fasilitas pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri lokal, sehingga memperbesar peluang kerja bagi lulusan. (Munir, 2017)

Salah satu bidang reformasi kebijakan di Indonesia adalah kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan layanan kesehatan yang murah dan merata. Pengembangan visi kesehatan yang inklusif dan berkualitas tinggi sangat terbantu oleh para pemimpin yang visioner di bidang ini. Adapun studi yang menjelaskan bahwa pemimpin di beberapa daerah menerapkan visi "Kesehatan untuk Semua" dengan fokus pada layanan kesehatan primer yang mudah diakses oleh masyarakat pedesaan. Di beberapa kabupaten, program seperti posyandu keliling dan klinik bergerak diperkenalkan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, pemimpin visioner di sektor kesehatan juga meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan tenaga medis agar kualitas layanan terus meningkat. (Faedlulloh et al., 2019)

Dalam konteks Indonesia, reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak akan mungkin berhasil tanpa adanya kepemimpinan visioner. Pemimpin di sektor kesehatan menyadari bahwa sistem kesehatan nasional yang inklusif adalah visi jangka panjang yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas. Mereka mengkomunikasikan pentingnya reformasi kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, yang memicu perubahan kebijakan kesehatan nasional. (Susanti et al., 2022)

Finlandia merupakan contoh sukses reformasi kebijakan di sektor publik yang dipimpin oleh kepemimpinan visioner. Dalam reformasi sistem pendidikannya pada tahun 1990-an, para pemimpin di sektor pendidikan mengembangkan visi untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan inovatif. Visi ini berhasil menarik dukungan dari guru, masyarakat, dan pemerintah. Pemimpin visioner di Finlandia menekankan pada kualitas dan kepercayaan dalam pendidikan, yang membawa perubahan kebijakan signifikan, termasuk pelatihan guru yang lebih baik, kurikulum yang lebih fleksibel, dan pengurangan tes standar yang ketat. Reformasi ini terbukti sukses, membawa sistem pendidikan Finlandia menjadi salah satu yang terbaik di dunia berdasarkan hasil PISA. (Sahlberg, 2011)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa pemimpin visioner memainkan peran penting dalam mendorong reformasi kebijakan di sektor publik. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan visi yang jelas, memobilisasi dukungan dari berbagai pihak, menciptakan sense of urgency terhadap perlunya perubahan, dan memastikan keberlanjutan visi dalam menghadapi tantangan yang ada. Meskipun dihadapi dengan resistensi internal, dinamika politik, dan tekanan eksternal, pemimpin visioner yang sukses mampu mengatasi tantangan tersebut melalui komunikasi efektif, pendidikan, dan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perubahan.

Studi kasus tentang reformasi kebijakan pendidikan di Finlandia menjadi contoh sukses dampak kepemimpinan visioner dalam menciptakan perubahan signifikan. Reformasi yang dipimpin oleh pemimpin visioner di Finlandia telah membuktikan bahwa visi jangka panjang, fokus pada kualitas, inovasi, dan kepercayaan dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam sektor publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan visioner dapat mempengaruhi keberhasilan reformasi kebijakan di sektor publik. Pemimpin visioner mampu menciptakan perubahan yang inovatif, adaptif, efisien, dan berkelanjutan, serta mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan reformasi yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2018). *ELEMENT AND FACTOR GOVERNANCE INNOVATION IN*. 6(3), 207–222.
- Ashshiddiqi, M. T., Nisa, E. A., Hasanah, F. U., Juniar, F., & Pamungkas, H. A. (2021). Strategi Entrepreneurial Government Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(2), 57–67. <https://doi.org/10.15575/jim.v2i2.14380>
- Boyne, G. A. (2003). Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 13(3), 367–394. <https://doi.org/10.1093/jopart/mug027>
- Faedlulloh, D., Yulianto, & Karmilasari, V. (2019). Reformasi Birokrasi di Periode Kedua: Mendorong Agenda Reformasi Struktural dan Pola Pikir. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung*, 1–9. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/15253>
- Fahira, M. D. (2016). Inovasi Kepemimpinan Daerah : Studi Kasus Kepemimpinan Ridwan Kamil di Kota Bandung Mirtha Deppy Fahira Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email : mirthadeppyfahira@gmail.com Eko Priyono P , S . IP ., M . Si ., M . Res , P. *Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, December*.
- Fernandez, S., Rainey, H. G., Connor, P. E., Thompson, F., Christopher Mihm, J., & Tschirhart, M. (2017). Managing Successful Organizational Change in the Public Sector*. *Debating Public Administration: Management Challenges, Choices, and Opportunities*, April, 7–26. <https://doi.org/10.4324/9781315095097-2>
- Henriyani, E. (2020). Peran Pemimpin Visioner dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Moderat*, 6(2), 436–443. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3427>
- Iskandar, D. J. (2017). Menilik Kembali Makna Reformasi Birokrasi Publik Dalam Konteks Aktualisasi Semangat Pelayanan Publik Prima. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*. <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/149%0Ahttps://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/>

- article/download/149/151
- Isnaini Muallidin, S. I. P., M. P. (2016). Kepemimpinan Transformasional dalam kajian teoritik dan empiris. *Working Paper*, 2007, 1–15.
https://www.academia.edu/download/54741608/Working_Papers_-_KEPEMIMPINAN_TRANSFORMASIONAL_DALAM_PERSPEKTIF_TEORITIS_DAN_EMPIRIS.pdf
- Liyanti, Sarah, S., Hardianto, Hardin, L., & Gazalin, J. (2024). Kepemimpinan Visioner Dalam Mentransformasi Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Journal of Internasional Multidisciplinary Research Kepemimpinan*, 2(1), 486–492.
- Makalao, D. A. M., & Z Soeratin, H. (2023). Peran Kepemimpinan Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 Dan Sosial Media. *Journal of Islamic Education Leadership*, 3(1), 28–50. <https://doi.org/10.30984/jmpi.v3i1.581>
- Manurung, A. S., Putri, D. A., & Nasution, A. R. (2024). Peran Pemimpin terhadap Perubahan Sistem Ekonomi Menuju Indonesia Maju. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 37. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.425>
- Moynihan, D. P., & Wart, M. Van. (2013). <2013 Lessons from Leadership Theory and the Contemporary Challenges of Leaders good wart2013.pdf>. 73, 553–565. <https://doi.org/10.1111/puar.12069.Lessons>
- Munir, F. (2017). Pengaruh Kepimpinan Negara- Negara di Asia Dalam Reformasi Birokrasi Indonesia. *WEDANA, Jurnal Pemerintah, Politik Dan Birokrasi*, III(April), 314–323.
- Muttaqijn, M. I. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Visioner, Komunikasi Organisasi Dan Kompetensi Karyawan Terhadap Kepuasan Kerja. *Jurnal Dinamika UMT*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.31000/dinamika.v1i1.506>
- Nugroho, R. Y. Y., & Adiyanto, M. R. (2023). Persepsi Masyarakat Untuk Pengembangan Wisata Berkelanjutan di Pesisir Madura. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(1), 13. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v13i1.12285>
- Nurasyiah, R., & Rahmiati, S. (2019). Evaluasi Kinerja Kebijakan Sektor Pariwisata dalam Mendukung Kota Serang Sebagai Kota Kreatif. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(02), 34–54. <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/jmb/article/view/1228%0Ahttp://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/jmb/article/download/1228/751>
- Nuruddin, M., & Rahmah, Y. F. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten. *PRESTISE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis*, 03(02), 69.
- Oktaviana, S., & Hendriani, S. (2017). Pengaruh Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Efektivitas Organisasi Melalui Kompetensi Pada Pegawai Negeri Sipil di Biro Umum dan Dinas *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, IX(3), 180–197. <https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTMB/article/viewFile/4934/4650>
- Perubahan, R. (2019). *Jurnal natapraja*. 7(1).
- Sahlberg, P. (2011). Finnish Lessons: What can British Columbia learn from educational change in Finland. *BCSTA Annual Meeting, April*.
- Sofyan Tsauri dan Finadatul Wahidah. (2023). Strategi kepemimpinan entrepreneurship kiai dalam eskalasi kemandirian santri melalui pendidikan terpadu di pesantren. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4, 62–84. <https://doi.org/10.35719/leaderia.v2i2.361>

- Sumantri, I. (2022). Reorientasi Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Sektor Publik Di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 63–72. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.679>
- Sunarto, S., & Welly, B. (2019). Peran Pemimpin Daerah dalam Menuju Terciptanya Good Governance Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(3), 109–114. <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i3.676>
- Susanti, G., Iva, M. I. N., Yani, A. A., & Hidayat, A. R. (2022). Assessing the National Health Insurance System: a Study of the Implementation of Health Insurance Policy in Indonesia. *Public Policy and Administration*, 21(4), 511–525. <https://doi.org/10.13165/VPA-22-21-4-13>
- Tuntutan, H. D. A. N. (1997). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA* :
- Widiyastomo, R. P. (2020). Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Tahun 2020 - 2024. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 17(2), 84. <https://doi.org/10.56444/mia.v17i2.1781>